

ABSTRAK

Tanjungpinang merupakan salah satu daerah yang menjadi *entry point* penampungan dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) yang dideportasi dari Malaysia. Tingginya jumlah TKIB yang dideportasi dari Malaysia melalui Kota Tanjungpinang, telah membuat Pemerintah Kota Tanjungpinang kewalahan mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Tanjungpinang berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana *collaborative governance* yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya penanganan TKIB di Tanjungpinang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penanganan TKIB.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa *collaborative governance* yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanganan TKIB masih belum maksimal. Dari analisis terhadap variabel yang digunakan untuk mengukur *collaborative governance* hanya variabel struktur jaringan, *governance* dan pembagian akuntabilitas yang sudah berjalan baik. Namun dinilai dari hal komitmen terhadap tujuan, kepercayaan antar *stakeholders*, akses terhadap kekuasaan, berbagi informasi dan akses terhadap sumber daya masih belum berjalan baik. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan bersama dalam penanganan TKIB.

Penelitian ini menyarankan perlunya melibatkan pihak swasta dan kelompok masyarakat secara menyeluruh, perlunya membuat tujuan bersama, perlunya membangun komunikasi dan meredam ego sektoral antar instansi yang terlibat dalam penanganan TKIB, perlunya membuat aturan bersama dan SOP penanganan TKIB, perlunya penyesuaian jumlah dan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan di lapangan, serta perlunya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana.

Kata Kunci: *Collaborative governance, TKI Bermasalah, Tanjungpinang*

ABSTRACT

Tanjungpinang is one of the areas to become an entry point for the shelter and repatriation of the Deprived Indonesian Migrant Workers (TKIB) deported from Malaysia. The high number of TKIB deported from Malaysia through Tanjungpinang city, has made the government of Tanjungpinang struggled resolving the problem. Therefore, to resolve the problem the government of Tanjungpinang has collaborated and coordinated with various stakeholders to resolve the situation.

The purpose of this research was to analyze how far the collaborative governance done by the local government in the effort to deal with the TKIB in Tanjungpinang. The method used in this research was the qualitative method by using descriptive approach. Interview, observation, and documentation relating to the effort to deal with the TKIB is the technique of the collecting data of this research.

This research found out that collaborative governance done by the government in the effort to deal with the TKIB is not optimal. The analysis of the variables used in measuring the collaborative governance showed that only the variable of network structure, government, and the accountability division have worked well. However, judging from the commitment to the goals, trust among the stakeholders, access to the power, sharing the information and access to the resources have not worked well. This was due to the lack of joint rules in dealing with the TKIB.

This research suggested that the private sector and the whole community should be involved, the common goals should be made, the communication should be built and the sectoral ego between agencies involved in the effort to deal with the TKIB should be suppressed, the joint rules and the Standard Operating Procedure of dealing with the TKIB should be made, human resources according to the needs in the field need adjustments, and the facilities and infrastructures need to be improved.

Keyword: *Collaborative governance, Deprived Indonesian Migrant Workers, Tanjungpinang*